

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntan publik adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, serta beragam pihak berkepentingan lainnya, dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana dan profesional. Akuntan publik harus mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, akuntan publik harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Sebagai seorang auditor, etika merupakan suatu hal penting yang mendasar yang harus dimiliki. Walaupun terdapat suatu aturan terkait etika yang harus dimiliki oleh auditor, hal ini tidak menjamin seorang auditor

terlepas dari adanya suatu permasalahan terkait etika. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah dilema dalam perjalanan praktik auditor di Indonesia. Auditor kemudian dihadapkan pada permasalahan etika ketika berhadapan dan berfungsi sebagai penyeimbang dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam penerapannya, masih banyak terdapat pelanggaran etika yang dilakukan oleh auditor akibat adanya dilemma etis atau situasi konflik yang mereka hadapi. Pada tahun 2001, KAP Andersen terlibat kasus dengan Enron dimana KAP tersebut membantu Enron untuk memanipulasi laba perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan KAP Andersen guna mempertahankan Enron sebagai klien mereka. KAP Andersen mengakui bahwa Enron memiliki laba sekitar \$ 393 ketika Enron justru mengalami kerugian sebesar \$ 644 juta.

Kemudian pada tahun yang sama, KPMG juga terlibat dalam kasus pelanggaran prinsip-prinsip kode etik. KAP tersebut terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US\$ 75 ribu guna meringankan kewajiban pajak kliennya. Akibat tindakan KPMG ini, kewajiban pajak PT Easman Christensen merosot dari US\$ 3,2 juta menjadi hanya US\$ 270 ribu. Hal ini tentunya menunjukkan auditor mereka tidak memiliki nilai etika atau moral yang baik.

Selain kasus-kasus yang terjadi pada auditor independen, kasus-kasus audit juga pernah dilakukan oleh auditor pemerintah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah terlibat kasus terkait laporan hasil audit tim BPKP atas perhitungan kerugian keuangan negara dalam

perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi 2,1 GHz/Generasi 3 (3G) oleh Indosat Mega Media (IM2) sebesar Rp 1,3 Triliun dan kasus dugaan korupsi oleh PT. Chevron Pacifik Indonesia sebesar USD 9,9 juta. Namun pihak IM2 menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan BPKP tersebut. PTUN mengabulkan gugatan pihak IM2 dengan membatalkan laporan audit BPKP dan mengkaji ulang persyaratan kerja sama (beritasatu.com, 2014).

Kasus terkait BPKP juga pernah terjadi di Semarang. BPKP digugat atas laporan audit yang diterbitkan dengan kesimpulan adanya kerugian negara sebesar Rp 12,2 milyar perihal kasus korupsi Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga pada pekerjaan galian tanah dan drainase karena BPKP tidak menggunakan standar operasional prosedur dalam melaksanakan proses audit. Pengadilan negeri Semarang berkesimpulan bahwa BPKP telah melakukan pelanggaran hukum dengan mengeluarkan hasil audit tersebut (bisniskeuangan.kompas.com, 2012).

Selain kasus-kasus tersebut, BPKP juga pernah terlibat dalam pelanggaran penerapan etika dalam menjalankan fungsinya sebagai auditor pemerintah. Pada tahun anggaran 2009, auditor BPKP menerima suap ketika penyusunan SOP kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sarana orasarana dengan Itjen Kemendiknas. Auditor BPKP menerima uang yang berasal dari sisa anggaran kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan auditor BPKP telah melanggar prinsip kode etik yang diatur (news.detik.com, 2013).

Terjadinya kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih banyak terdapat auditor yang belum menegakkan serta menerapkan kode etik yang ada. Untuk itu mutlak seorang diperlukan kesadaran etis yang tinggi dari setiap auditor dalam mengalami setiap dilemma etis atau situasi konflik yang terjadi. Untuk dapat mencegah terjadinya kasus-kasus serupa, seorang auditor perlu memiliki suatu sensitivitas terhadap masalah etika.

Sensitivitas etika merupakan kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika dari sebuah keputusan. Kepekaan terhadap suatu permasalahan etika inilah yang akan mempengaruhi kualitas dari keputusan yang diambil oleh auditor. Jika auditor tidak mengakui sifat dasar etika dalam keputusan, skema moralnya tidak akan mengarah pada masalah etika tersebut (Jones, 1991) dalam Numa Aziza dan Andi Agus (2008).

Penelitian terkait sensitivitas etika telah banyak dilakukan sebelumnya. Faktor-faktor yang dinilai mempengaruhi sensitivitas etika pun sangat beragam. Sutiarsih, Herawati dan Sinawarti (2014) mengemukakan bahwa budaya etis, idealisme, dan relativisme berpengaruh secara signifikan kepada sensitivitas etika auditor.

Dalam penelitian lain, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sensitivitas etika seorang auditor adalah idealisme, relativisme, tingkat komitmen profesional, dan tingkat komitmen organisasi (Aziza dan Agus Salim, 2008). Faktor-faktor ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asiana, Suartana, dan Rasmini (2013) terkait sensitivitas etika auditor.

Martina, Werastuti, dan Sujana (2015) meneliti pengaruh budaya etis organisasi, orientasi etika, pengalaman, dan profesionalisme terhadap sensitivitas etika. Dari penelitian tersebut dikemukakan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh kepada sensitivitas etika.

Putri dan Wahyuningsih (2012) menguji variabel idealisme, relativisme, komitmen profesional, dan komitmen organisasi terhadap sensitivitas etika auditor pada BPKP perwakilan Provinsi Riau. Dari penelitian ini dikemukakan bahwa relativisme berpengaruh secara negatif dan komitmen profesional berpengaruh secara positif terhadap sensitivitas etika auditor. Sedangkan idealisme dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor BPKP perwakilan provinsi Riau.

Salah satu hal yang dapat membantu mengatasi permasalahan sensitivitas etika adalah idealisme yang dimiliki oleh auditor tersebut. Idealisme merupakan kepercayaan individual untuk tetap tidak melanggar etika moral (Putri dan Wahyuningsih, 2012). Dengan memiliki suatu idealisme, hal ini diharapkan dapat menjadikan auditor lebih peka terhadap sifat dasar etika dalam membuat keputusan untuk mengatasi permasalahan etika yang ada. Idealisme yang dimiliki seorang auditor akan membuat auditor selalu berusaha untuk dapat menghindari kesalahan dalam proses atau hal yang sedang ia lakukan.

Seorang auditor yang idealistis mencoba untuk menghindari kesalahan kepada pengguna laporan keuangan dan setia pada standar profesi. Sikap idealis juga diartikan sebagai sikap tidak memihak dan terhindar dari berbagai

kepentingan. Seorang akuntan yang tidak bersikap idealis hanya mementingkan dirinya sendiri agar mendapat fee yang tinggi dengan meninggalkan sikap independensi. Seorang yang memiliki tingkat idealisme yang rendah tentunya akan memiliki tingkat sensitivitas etika rendah pula, sehingga akan cenderung mengabaikan kaidah moral dan etika yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurna Aziza dan Andi Agus Salim (2008) dan Gede Herry, I wayan Suartana, dan Ni Ketut Rasmini (2013) menunjukkan hasil bahwa idealisme berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor. Sedangkan hasil penelitian oleh Putri dan Eny Wahyuningsih mengemukakan bahwa idealisme tidak berpengaruh terhadap sensitivitas etika auditor.

Hal selanjutnya yang dapat mempengaruhi sensitivitas etika seorang auditor adalah relativisme. Relativisme adalah tindakan untuk menolak nilai-nilai moral yang mutlak dalam mengendalikan perilaku seseorang (Annisa, 2014). Auditor yang memiliki relativisme yang tinggi maka akan memiliki suatu tingkat kepekaan terhadap etika yang rendah. Seorang auditor dengan relativisme yang tinggi menggambarkan suatu kegagalan auditor untuk dapat memahami permasalahan dan nilai etika atau moral auditor tersebut.

Relativisme rendah akan lebih peka terhadap situasi yang melanggar norma atau etika. Seorang auditor yang relativistis cenderung untuk menolak prinsip moral secara universal sebagai pedoman untuk bertindak. Seorang dengan tingkat relativisme tinggi akan cenderung mengabaikan etika dalam

proses mengambil keputusan mereka, sehingga akan memunculkan suatu pelanggaran baru terhadap etika serta prinsip yang telah diatur.

Penelitian yang mendukung relativisme berpengaruh kepada sensitivitas etika auditor adalah Gusti Ayu Sutiarsih, Nyoman Trisna dan Ni Kadek Sinawarti (2014). Anisa Fitri (2014) memberikan hasil bahwa Relativisme berpengaruh negative terhadap sensitivitas etika auditor.

Komitmen profesional yang dimiliki oleh seorang auditor, merupakan salah satu aspek yang diharapkan dapat meningkatkan sensitivitas etika yang mereka miliki. Auditor dengan komitmen profesional yang mereka miliki akan membuat mereka lebih peka dalam menghadapi keadaan etika serta cenderung mendahulukan kepentingan profesi dibanding kepentingan pribadinya. Seorang dengan tingkat komitmen profesional tinggi akan membuat auditor lebih menjaga tujuan dari profesi mereka. Dengan hal ini, auditor akan cenderung menghindari bentuk pelanggaran etika dalam praktik mereka.

Seorang auditor yang memiliki komitmen profesional yang tinggi tentu berkeinginan untuk memelihara keanggotaan profesinya dengan menghindari tindakan pelanggaran etika. Auditor yang tidak memiliki komitmen profesional atau memiliki komitmen profesional yang rendah tentunya tidak akan memiliki pertimbangan dan efek terhadap profesinya ketika melakukan suatu tindakan yang tidak etis dalam pekerjaannya. Komitmen profesional rendah yang dimiliki oleh auditor akan berakibat pada rendahnya sensitivitas etika yang mereka miliki.

Hasil penelitian Putri dan Eny Wahyuningsih (2012) menunjukkan bahwa komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas etika auditor. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dani Adi Kurniawan dan Indira Januarti (2013) justru menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Hal berikutnya yang dapat meningkatkan sensitivitas etika auditor adalah adanya komitmen organisasi. Nurna dan Andi (2008) mengatakan bahwa komitmen organisasi terjadi karena adanya keinginan yang dimiliki seseorang untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Keinginan tersebut akan mampu membangun sikap dimana auditor akan melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dari organisasi mereka. Hal inilah yang kemudian akan membuat seorang auditor memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Seorang dengan komitmen tinggi akan lebih memiliki perilaku etik yang lebih baik.

Auditor yang memiliki komitmen organisasi yang rendah akan cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan mengutamakan tujuan dari organisasinya. Sebagai akibat dari sikap mengutamakan pribadinya ini akan membuat seorang auditor memiliki sensitivitas yang rendah dalam mengatasi permasalahan etis yang mereka hadapi. Seorang dengan komitmen organisasi yang rendah akan cenderung mengabaikan nilai etis dalam perilaku mereka sehingga mendorong terjadinya pelanggaran norma atau etika seorang auditor.

Dani Adi Kurniawan dan Indira Januarti (2013) mendukung hipotesis yang mengatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif

terhadap sensitivitas etika. Penelitian yang dilakukan oleh Nurna Aziza dan Andi Agus Salim (2008) justru mendapatkan hasil yang berlawanan bahwa komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap sensitivitas etika.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diharapkan menjunjung nilai transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pihak yang mengawasi serta memeriksa kebenaran laporan keuangan guna menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah auditor internal dalam pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagaimana diamanatkan dalam dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu (bpkp.go.id)

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden RI Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP, BPKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, BPKP memiliki beberapa fungsi. Satu diantaranya adalah melaksanakan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lain terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan oleh negara atau daerah.

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan benar, tentunya auditor BPKP harus memiliki sensitivitas terhadap etika yang tinggi. Sensitivitas yang mereka miliki diharapkan dapat membentuk benteng pertahanan untuk dapat mempertahankan moral dan etika mereka. Sehingga, fungsi auditor sebagai penyeimbang antara kepentingan dari berbagai pihak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan antara variabel-variabel terkait secara parsial kepada sensitivitas etika karena masih adanya perbedaan hasil pada penelitian-penelitian terdahulu pada variabel idealisme, relativisme, komitmen profesional, dan komitmen organisasi. BPKP yang merupakan auditor internal pemerintah digunakan sebagai responden penelitian karena masih minimnya penelitian terdahulu terkait sensitivitas etika yang dilakukan terhadap auditor pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian pada BPKP Pusat dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sensitivitas Etika pada Auditor di Kantor Pusat BPKP RI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya dilema etis bagi auditor sebagai penyeimbang kepentingan berbagai pihak.
2. Adanya prinsip dan aturan etika profesi tidak menjamin seorang auditor akan terlepas dari permasalahan terkait etika
3. Masih banyaknya auditor yang tidak memiliki nilai etika atau moral yang baik serta belum menerapkan kode etik yang ada.
4. Masih rendahnya kesadaran etik auditor dalam menghadapi dilema etik.
5. Tingkat sensitivitas etika auditor yang rendah dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran etika pada akuntan publik.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batasan-batasan sehingga permasalahan dapat dikaji secara terfokus dan jelas. Masalah dalam penelitian ini hanya berkisar pada idealisme, relativisme, komitmen profesional, komitmen organisasi, dan sensitivitas etika auditor yang terdapat di BPKP Pusat pada tahun 2016.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Apakah Idealisme berpengaruh terhadap Sensitivitas Etika Auditor?
- b. Apakah Relativisme berpengaruh terhadap Sensitivitas Etika Auditor?
- c. Apakah Komitmen Profesional berpengaruh terhadap Sensitivitas Etika Auditor?
- d. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Sensitivitas Etika Auditor?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal-hal yang mempengaruhi sensitivitas etika auditor.
2. Untuk memberikan bukti terbaru terkait pengaruh yang berbeda-beda dari variabel-variabel bebas terhadap sensitivitas etika auditor pada penelitian-penelitian sebelumnya.
3. Memberikan gambaran pengaruh dari variabel-variabel bebas kepada variabel terikat pada tempat atau sebaran wilayah yang berbeda.